

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Afan Ghafar. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1999.
- Affan Gaffar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ambar Teguh Sulistiyani (Ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Bisma Siregar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Drs. AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Eka Diah Kartiningrum. *Panduan Penyusunan Studi Literatur," Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 2015.
- Eko Maulana Ali. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, PT.Multicerdas Publishing, Jakarta, 2012.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Pemikiran hamdanzoelva, *Artikel*, August 11, 2014.
- Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- John Adair. *Kepemimpinan yang memotivasi*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- Leo Agustino. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, Bandung, 2008.

Nandang Alamsah. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2019.

Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2007.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Rahman Zaunuddin. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Riant Nugroho. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Elex/Gramedia, Jakarta, 2004.

Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Jurnal, Skripsi, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya

Aditya yodi saputra. "Jurnal Tentang Dampak Positif Dan Negatif Tentang Mantan Narapidana Mencalon Sebagai Pejabat Publik." *Skripsi* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Karimah, Ummah. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.* "AlMurabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 2015.

Khotibul Umam. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Ampel, *Skripsi*, Surabaya, 2020.

Khoirul Ihwan Nur Fadli. "Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan Mk Nomor 56/PUU-XVII/2019)." Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri, *Skripsi*, Purwokerto, 2021.

M Ashraf Ali, Didik Suhariyanto, Dan Gradios Nyoman Tio Rae. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta, Vol 4 Nomor 1 2023.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1140/Pid/B/2018/PN.Jkt.Sel., 2018.

Wira Atma, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono. “Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat tidak dipidana Calon Kepala Daerah.” Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Riau, Vol 5, Nomor 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016).

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1140/Pid/B/2018/PN.Jkt.Sel., 2018.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota